

LAPORAN PEMANTAUAN

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2020

Wana Alamsyah
Peneliti ICW



PEMBAHASAN

Latar Belakang

Tujuan

Metode

Temuan Umum

Modus

Pengenaan Pasal

Sektor

Jabatan

Kinerja Penegak Hukum

Kesimpulan

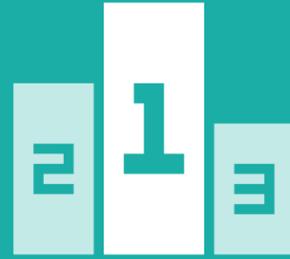
Rekomendasi

LATAR BELAKANG

- Institusi penegak hukum belum transparan dan akuntabel
- Upaya masyarakat dalam memantau kinerja penegak hukum dalam aspek penanganan perkara



Anti Corruption



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS



MENUJU
INFORMATIF



TIDAK
DIKETAHUI



TIDAK
DIKETAHUI

LAPORAN PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019

**RULE OF LAW INDEX - ABSENCE OF CORRUPTION
TAHUN 2020**

**92 DARI 128
NEGARA**

SKOR 0,39



TUJUAN

- Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum

METODE

- Sumber informasi berasal dari kanal institusi penegak hukum dan/atau media.
- Periode pemantauan: 1 Januari 2020 – 30 Juni 2020
- Analisis deskriptif



TEMUAN UMUM

Kasus



169 kasus

Tersangka



372 orang

Kerugian Negara



Rp18,1 triliun

Nilai Suap



Rp20,2 miliar

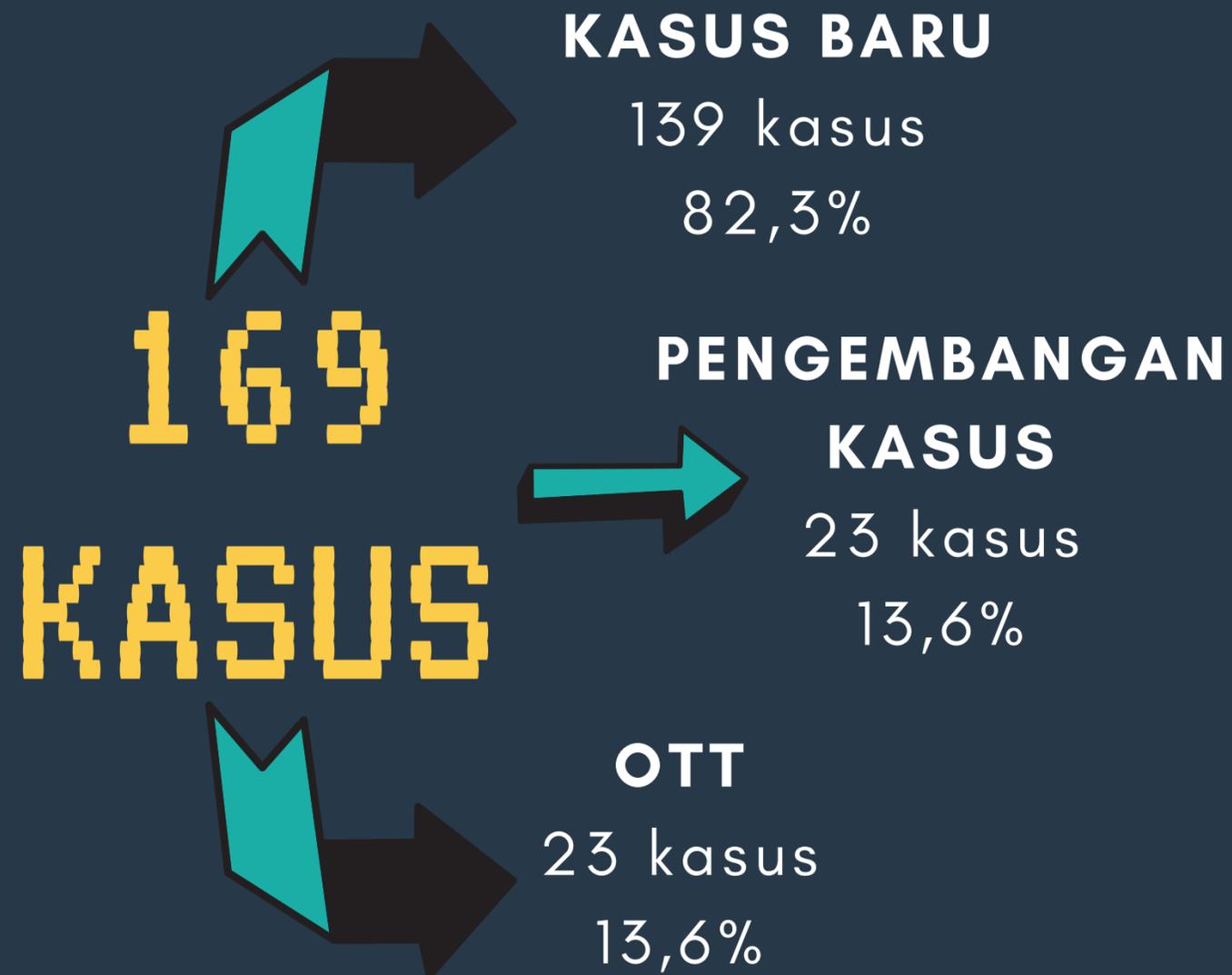
Nilai Pungli



Rp40,6 miliar



TEMUAN UMUM

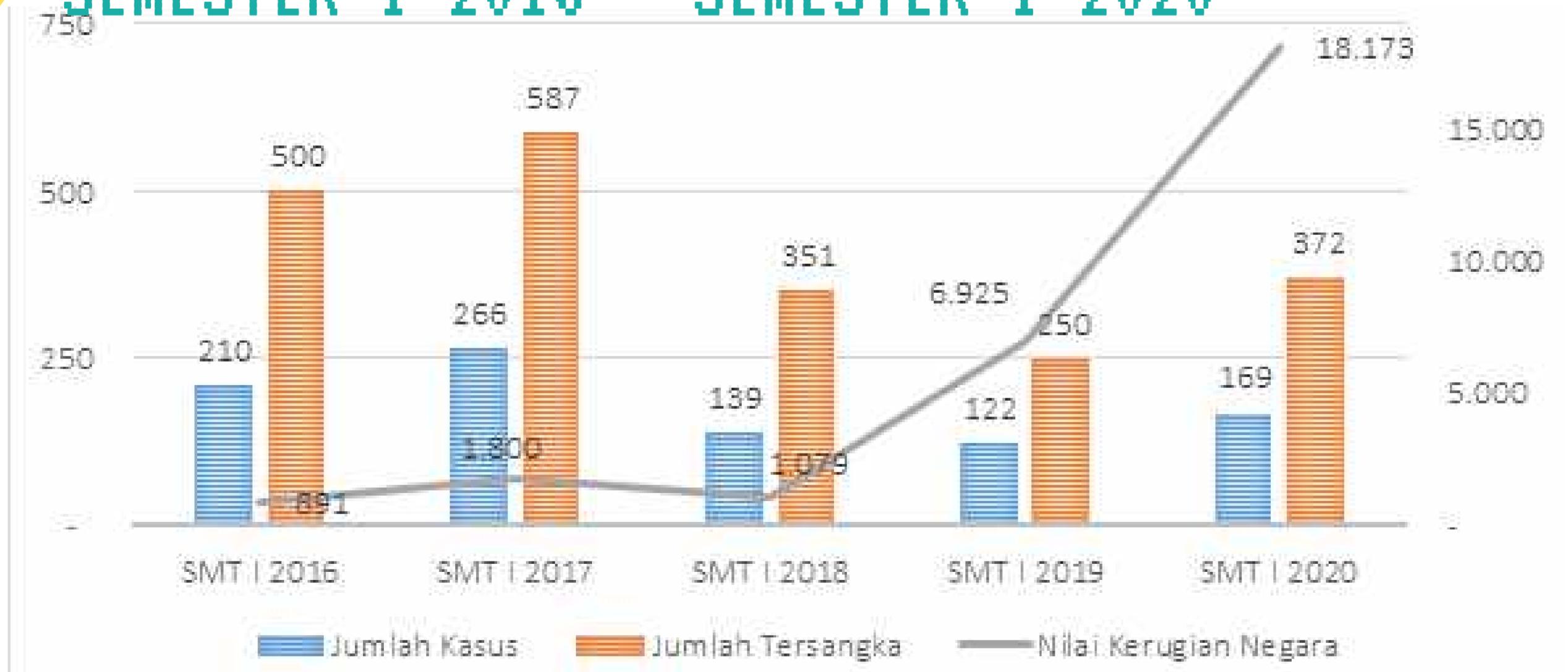


X

KASUS/BULAN
28 kasus
TERSANGKA/BULAN
60 tersangka



TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2016 - SEMESTER I 2020

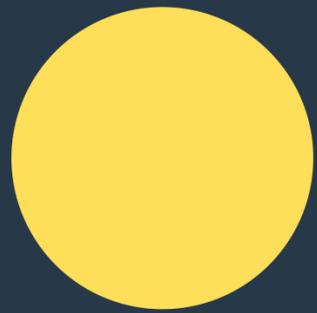


- Penanganan perkara korupsi mengalami fluktuasi pada semester I di setiap tahunnya.
- Total kerugian negara selama 5 (lima) semester sebesar Rp28,8 triliun.



TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2016 - SEMESTER I 2020

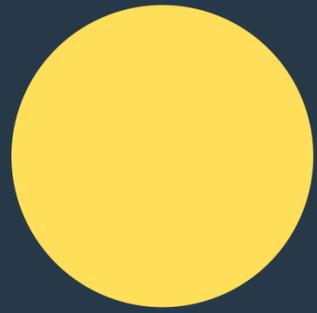
- Tingkat transparansi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum rendah.
- Mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara malfungsi.



KORUPSI BERDASARKAN MODUS

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Penggelapan	47	Rp233,7 miliar	-	-
2	Mark Up	33	Rp509 miliar	-	-
3	Kegiatan/Proyek Fiktif	26	Rp376,1 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	14	Rp48,4 miliar	-	-
5	Pungutan Liar	12	-	-	Rp44,6 miliar
6	Penyalahgunaan Wewenang	9	Rp78,6 miliar	-	-
7	Penyalahgunaan Anggaran	8	Rp2,6 miliar	-	-
8	Suap	6	-	Rp1,1 miliar	-
9	Penyunatan/Pemotongan	6	Rp8,5 miliar	-	-
10	Manipulasi Saham	4	Rp16,9 triliun	-	-
11	Gratifikasi	2	-	Rp19,1 miliar	-
12	Anggaran Ganda	1	Rp1,5 miliar	-	-
13	Mark Down	1	-	-	-
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

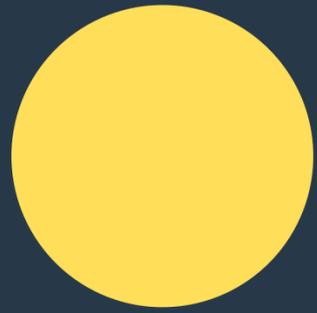
- Terdapat modus baru yang muncul, yakni manipulasi saham.
- Terdapat 4 (empat) kasus korupsi dengan modus manipulasi saham dengan total kerugian negara Rp16,9 triliun.
- Pelaku yang dijerat sebanyak 14 orang dan 13 korporasi.
- Salah satu kasusnya yang nilai kerugian negaranya besar yaitu korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya.



KORUPSI BERDASARKAN PENGENAAN PASAL

No	Pengenaan Pasal	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Kerugian Keuangan Negara	146	Rp18,1 triliun	-	-
2	Pemerasan	13	-	-	Rp44,6 miliar
3	Suap Menyuap	6	-	Rp1,1 miliar	-
4	Pencucian Uang	2	-	-	-
5	Gratifikasi	2	-	-	-
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

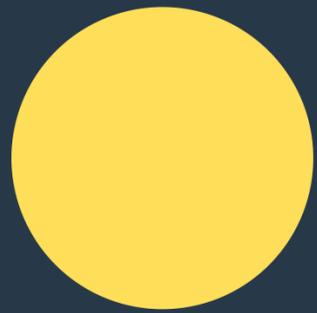
- Penegak hukum belum maksimal menggunakan instrumen yang ada di dalam UU Tipikor. Dari 7 (tujuh) jenis korupsi, penegak hukum hanya menggunakan 4 (empat) jenis saja.
- Hanya 1,2 persen kasus yang menerapkan pasal pencucian uang.
- Penegak hukum tidak serius dalam melakukan perampasan aset menggunakan instrumen pencucian uang.



KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Anggaran Desa	44	Rp16,6 miliar	-	-
2	Pemerintahan	13	Rp18,2 miliar	Rp19,5 miliar	-
3	Pertanahan	13	Rp36,3 miliar	-	Rp1,2 miliar
4	Transportasi	12	Rp809,9 miliar	-	-
5	Perbankan	11	Rp254,2 miliar	-	-
6	Pendidikan	8	Rp26,7 miliar	-	Rp43 miliar
7	Pengairan	7	Rp5 miliar	-	-
8	Pertanian	6	Rp4,9 miliar	-	Rp122 juta
9	Sosial Kemasyarakatan	6	Rp760 juta	Rp100 juta	Rp3,6 juta
10	Kesehatan	5	Rp13,3 miliar	Rp120 juta	-

- Anggaran desa menjadi salah satu sektor yang paling rawan dikorupsi.
- Korupsi sektor anggaran desa berpotensi akan meningkat di semester II 2020 apabila pemerintah tidak memiliki upaya mitigasi.
- Terdapat sektor baru yang muncul yakni korupsi sektor pasar modal.



KORUPSI BERDASARKAN JABATAN

No	Jabatan	Jumlah Tersangka	%
1	Aparatur Sipil Negara	114	30,7
2	Swasta	84	22,6
3	Kepala Desa	47	12,6
4	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Negara	23	6,2
5	Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23	6,2
6	Aparatur Desa	15	4
7	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah	13	3,5
8	Korporasi	13	3,5
9	Masyarakat	11	3
10	Ketua/Anggota Organisasi/Kelompok	7	1,9

- Aparatur Sipil Negara menjadi aktor yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum diikuti dengan pihak swasta.
- Terdapat 13 korporasi yang dijadikan tersangka oleh penegak hukum.
- Minimnya pengenaan pidana korupsi terhadap korporasi.

KINERJA PENEKAK HUKUM



KEJAKSAAN

Kasus Korupsi: 91 kasus
Tersangka: 198 orang
Kerugian Negara: Rp17,2 triliun



KEPOLISIAN

Kasus Korupsi: 72 kasus
Tersangka: 136 orang
Kerugian Negara: Rp131 miliar



KPK

Kasus Korupsi: 6 kasus
Tersangka: 38 orang
Kerugian Negara: Rp805 miliar



Tidak ditemukan adanya penanganan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum di Provinsi DI Yogyakarta dan Kalimantan Utara.

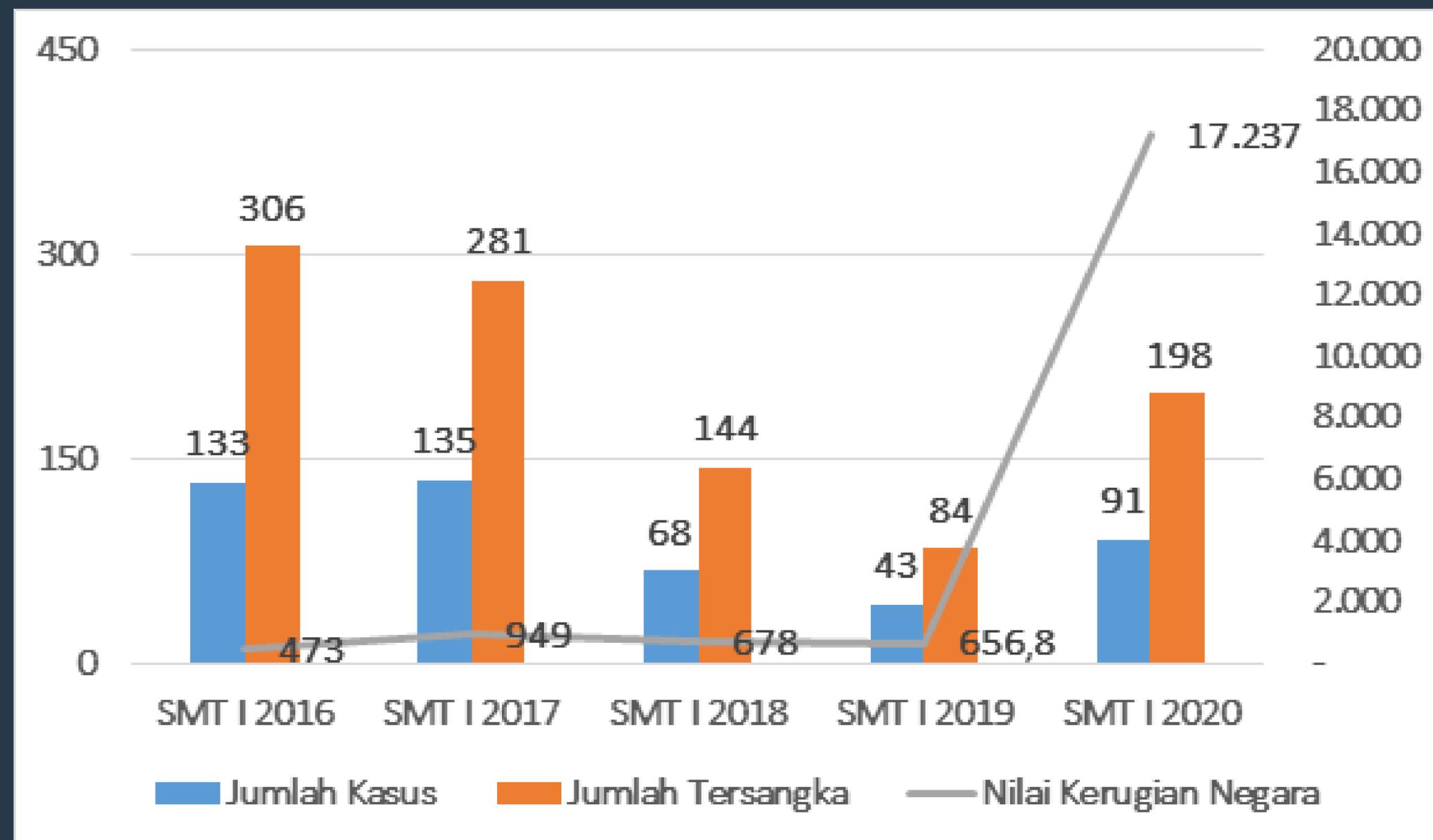
ANALISIS KINERJA PENEKAK HUKUM

**Target
VS
Realisasi**

**Pengenaan
Pasal**

**Aktor
Korupsi**

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI KEJAKSAAN



Target



517

kantor



Rp75,3

miliar



566

kasus

Realisasi



76

kantor



91 kasus

atau 16,1%

Pengenaan Pasal

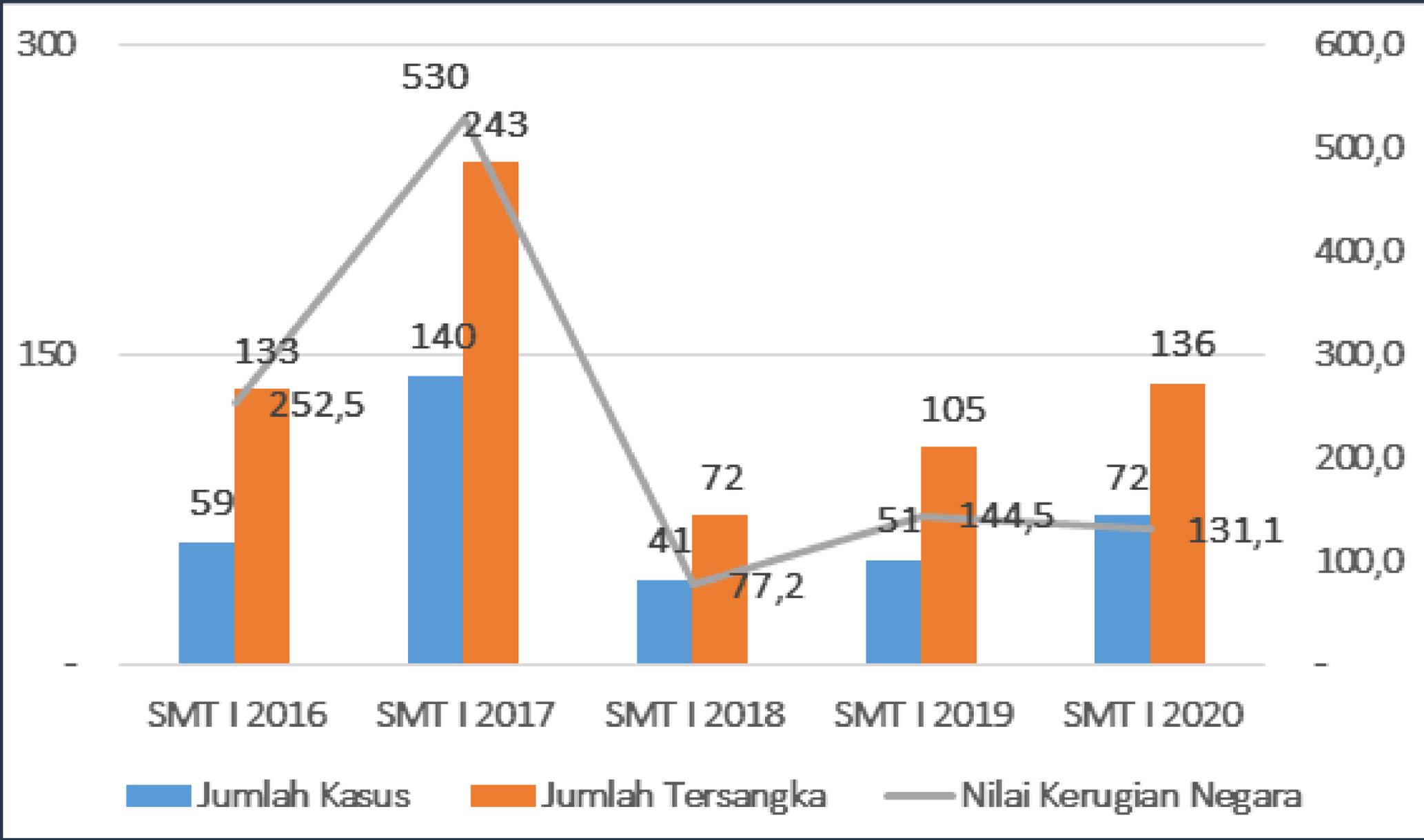
Kerugian Keuangan Negara	: 82 kasus
Pemerasan	: 5 kasus
Pencucian Uang	: 2 kasus
Gratifikasi	: 1 kasus
Suap Menyuar	: 1 kasus

Aktor Korupsi

Aparatur Sipil Negara	: 55 orang
Swasta	: 51 orang
Kepala Desa	: 20 orang
Korporasi	: 13 orang
Dirut/Karyawan BUMN	: 12 kasus



TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI KEPOLISIAN





Target



483
kantor



Rp277
miliar



1.539
kasus

Realisasi



63
kantor



72 kasus
atau 4,7%

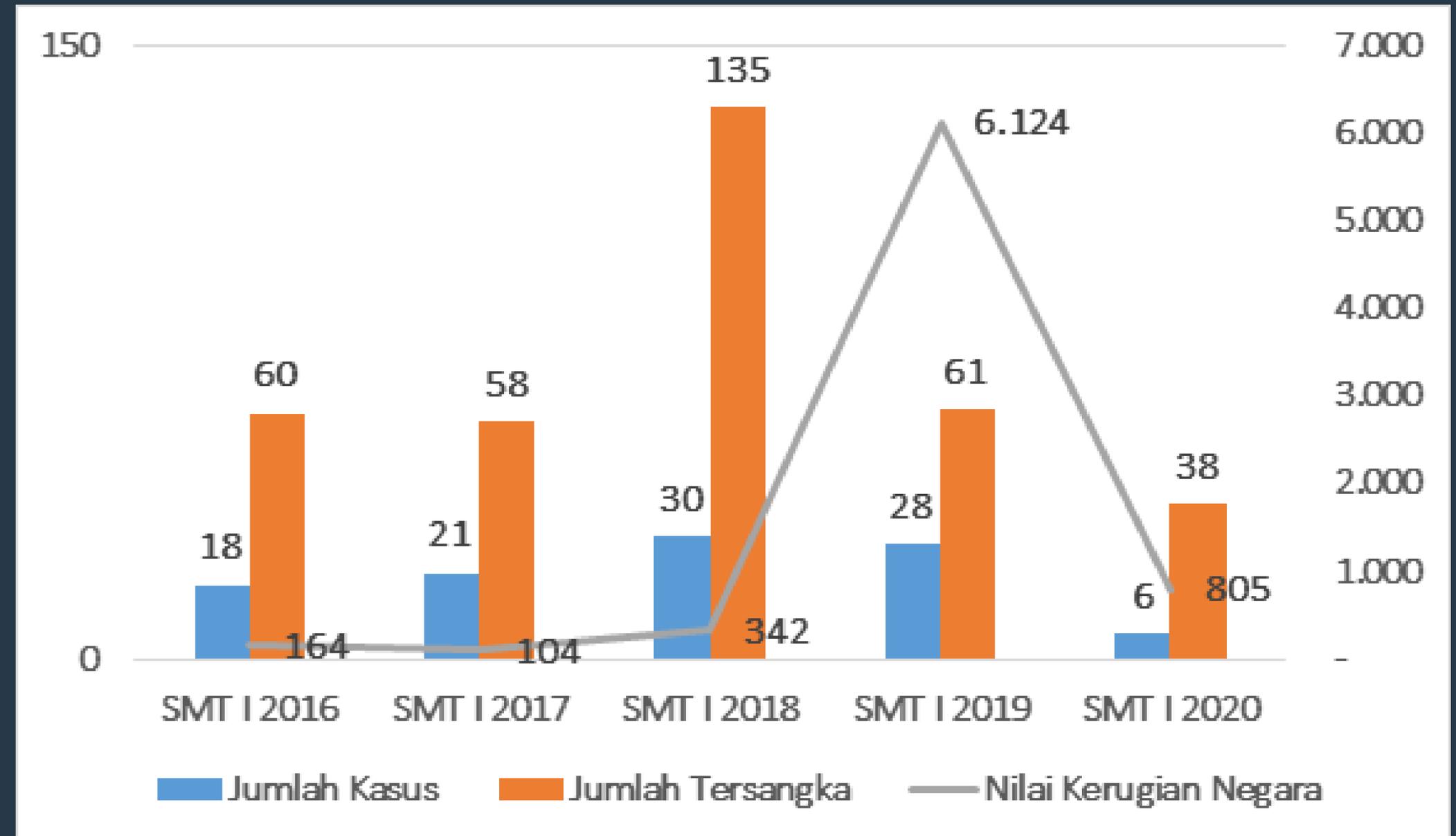
Pengenaan Pasal

Kerugian Keuangan Negara : 62 kasus
Pemerasan : 8 kasus
Gratifikasi : 1 kasus
Suap Menyuar : 1 kasus

Aktor Korupsi

Aparatur Sipil Negara : 53 orang
Kepala Desa : 27 orang
Swasta : 22 orang
Dirut/Karyawan BUMN : 9 orang
Aparatur Desa : 8 kasus

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI KPK



Target



Rp29,3
miliar



120
kasus

Realisasi



6 kasus
atau 5%

Pengenaan Pasal

Suap Menyuar : 4 kasus
Kerugian Keuangan Negara : 2 kasus

Aktor Korupsi

Ketua/Anggota DPRD : 15 orang
Swasta : 11 orang
Aparatur Sipil Negara : 6 orang



KESIMPULAN

- Terdapat modus baru yang terjadi yakni adanya manipulasi saham berkaitan dengan sektor pasar modal.
- Anggaran desa menjadi sektor yang paling rentan dikorupsi. Selain itu, munculnya kasus di sektor pasar modal memberikan peringatan bahwa adanya kerawanan terhadap sektor tersebut.
- Pelaku korupsi yang paling dominan ditangkap oleh penegak hukum yakni ASN dan swasta.
- Penegak hukum jarang atau tidak sama sekali menjerat pelaku yang berasal dari korporasi. Hal tersebut terbukti hanya ada 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.
- Kinerja penegak hukum dalam aspek penindakan kasus korupsi buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari target pencapaian sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2020 yang persentasenya di bawah 50 persen.
- Penegak hukum tidak menjadikan instrumen pencucian uang sebagai alat untuk memulihkan kerugian keuangan negara.



REKOMENDASI

- Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, terutama pada aspek pengenaan pasal pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa visi penegak hukum tidak sejalan dengan Presiden yakni memulihkan keuangan negara.
- Pemerintah harus memotong anggaran setiap institusi penegak hukum yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi.
- Dewan Perwakilan Rakyat harus meminta pertanggungjawaban kepada institusi penegak hukum mengenai tidak tercapainya realisasi penanganan perkara per semester I 2020.



SUMBER: DANY JOSUÉ VIGIL AVILÉS - DON'T EAT BRIBES

TERIMA KASIH



WEBSITE

www.antikorupsi.org



FACEBOOK

Sahabat ICW



TWITTER

@antikorupsi
@sahabatICW



INSTAGRAM

@sahabatICW